

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kenakalan siswa akhir-akhir ini sering terjadi di lingkungan sekolah, sebagai akibat tidak disiplinnya penerapan tata tertib sekolah yang belum dipahami oleh siswa dari latar belakang lingkungan pedesaan maupun letak sekolah yang merupakan masuk dalam kategori daerah pedesaan terpencil, sehingga muncul berbagai tindakan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah meskipun gejala yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan dengan pelanggaran-pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa yang bertempat tinggal dipertanian. Namun kecenderungan untuk melakukan pelanggaran tata tertib sekolah merupakan tanda adanya kemerosotan nilai moral sebagai dampak negatif pesatnya arus globalisasi di Indonesia saat ini. Sehingga siswa berusaha untuk meniru dan mencontoh tindakan-tindakan yang ada di berbagai media sebagai bentuk pencarian identitas diri seorang siswa dalam usia remaja agar diakui dan diterima dalam kelompoknya.

Dalam kasus-kasus kenakalan remaja, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2012) melaporkan data-data tawuran dikalangan pelajar seperti yang ditulis Eko Prihiawito dan Tommy Adiwibowo, dalam tajuk beritanya:

Berdasarkan data yang dikeluarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) selama bulan Januari sampai September 2012, kasus tawuran pelajar di wilayah Jabodetabek terus meningkat. Selama Januari sampai September 2012, kasus tawuran yang terjadi di wilayah Jabodetabek sebanyak 103 kasus. Ada 48 pelajar luka ringan, 39 luka berat dan 17 meninggal dunia. Sedangkan tingkat pendidikan pelaku tawuran terdiri dari, SD 2 kasus, SMP 19 kasus dan tingkat SMU/SMK 28 kasus". Viva-news "KPAI: Segera Bentuk Sekolah Ramah Anak.

Adapun bentuk-bentuk kenakalan remaja yang terjadi pada siswa mulai dari yang kekerasan verbal (penyampaian kata-kata), kekerasan fisik, hingga tindakan asusila seperti penghinaan hingga pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib

Iwan Sukma Nur Ichtiar, 2014

IMPLEMENTASI NILAI MORAL TATA TERTIB SEKOLAH SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SIMBOLIK

DALAM MENCEGAH KENAKALAN SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

disekolah juga bisa diindikasikan sebagai bentuk kenakalan remaja yang sedang mengalami masa yang penuh kegairahan yang tinggi namun diekspresikan dalam bentuk yang negatif dalam rangka mencari identitas diri sebagai manusia.

Permasalahan yang sering terjadi pada siswa di usia remaja berkaitan dengan masa-masa pertumbuhan dan perkembangan remaja yang berubah dari masa anak-anak. Hal ini ditegaskan oleh pendapat Asmani (2011: 14) dikatakan bahwa:

Pada masa remaja adalah masa penuh warna dan dinamika, disertai rangkaian gejala emosi yang menghiasi perjalanan seorang manusia yang hendak bertumbuh dewasa. Pada masa remajalah seorang manusia mulai membangun jati diri, memiliki kehendak bebas (*freewill* untuk memilih), memegang teguh prinsip, dan mengembangkan kapasitasnya.

Peralihan suatu masa pertumbuhan dan perkembangan seorang siswa dari masa anak-anak menuju masa remaja tersebut ditemukan banyak kasus pada kehidupan sehari-hari yang diawali dari tontonan dan perilaku tindakan kekerasan dimedia dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada perilaku anak-anak terutama para siswa disekolah dengan mengimitasi budaya atau perilaku kekerasan secara kolektif maupun secara individu.

Ragam persoalan kekerasan yang masuk dalam kategori kenakalan siswa dalam usia remaja tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan remaja pada usia sekolah menengah pertama (SMP). Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf (2012: 26) yang mengatakan bahwa masa usia sekolah menengah bertepatan dengan masa remaja.

Siswa dari sekolah menengah pertama yang dikategorikan dalam remaja yang sedang belajar mengalami pergolakan-pergolakan fisik dan psikologi yang dilihat dari pertumbuhan secara fisik dan perkembangan secara psikologi. Dalam Asmani (2011: 13) menjelaskan bahwa:

Masa yang paling bergolak dalam kehidupan manusia adalah masa remaja. Masa ini berlangsung dari usia 12 tahun sampai 18-20 tahun (yaitu usia sekolah menengah), dimana seorang anak mulai mengalami transformasi

dari anak-anak menjadi manusia dewasa. Masa ini juga menjadi masa di mana remaja belajar dan berkembang dalam mengenali diri dan lingkungan sekitarnya.

Persoalan tentang kenakalan siswa sering diidentikkan dengan tindakan kekerasan dikalangan siswa, untuk itulah pembekalan dan pemahaman tentang tindakan kekerasan juga masih belum dimengerti oleh para siswa. Persepsi tentang tindakan kekerasan dikalangan siswa bermula masih terfokus pada pengertian dan persepsi atau bahkan perspektif (sudut pandang) yang berbeda-beda dalam mengartikan tindakan kekerasan. Sebagian siswa mengartikan tindakan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan paksaan untuk mewujudkan niat seseorang atau sekelompok orang, serta dorongan untuk melukai siswa yang lainnya demi membela keyakinan dan atau kekerasan lain yang melibatkan fisik seseorang. Juga persepsi yang akan terbayang tentang tindakan kekerasan yang sering dikaitkan dengan tawuran atau perkelahian massal antar siswa. Sesuai dengan pandangan Martono, N., (2012: 1) mengemukakan bahwa:

Ketika kita mendengar kata “kekerasan”, sebagian diantara kita akan mengarahkannya pada sebuah peristiwa yang mengerikan, menakutkan, atau bahkan mematikan. Kekerasan juga dinilai sebagai sebuah tindakan yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia), suatu konsep yang menjadi fokus perhatian di berbagai forum diskusi. Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial kita baik politik, budaya, bahkan hingga pendidikan.

Persepsi tindakan kekerasan tersebut menggambarkan bahwa tindakan kekerasan juga berkaitan kenakalan remaja baik lingkungan masyarakat ataupun sekolah secara khusus di lingkungan kelas siswa yang masuk dalam kategori pelanggaran pelanggaran tata tertib sekolah. Sehingga tidak mengherankan ketika akan mengkaji dan mendalami fenomena tindakan kekerasan, maka definisi dan persepsi orang menghindari kajian tentang tindakan kekerasan bahkan akan melakukan penolakan baik dalam bentuk pendapat, persepsi maupun analisa tentang tindakan kekerasan. Padahal tindakan kekerasan sebenarnya tidak hanya

berupa fisik, melainkan bisa berbentuk simbol-simbol tertentu dalam artian yang lain, seperti kekerasan simbolik termasuk pelanggaran tata tertib sekolah.

Pada penelitian ini siswa yang dijadikan subyek penelitian merupakan siswa masuk dalam kategori siswa yang nakal dan sering melakukan tindakan kekerasan yang terjadi di kelas, terutama kelas VIII SMP Negeri 2 Japara, dimana siswa yang berada di kelas VIII tersebut termasuk dalam kategori remaja awal, sebab secara biologis siswa yang melakukan tindakan kekerasan tersebut bisa dikategorikan ke dalam batasan usia remaja awal yang sedang menuntut ilmu di SMP rata-rata berusia berkisar 12 tahun sampai dengan 15 tahun. Menurut Asmani (2012:41), mengungkapkan bahwa:

Batasan usia remaja yang umumnya digunakan para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga tahapan, yaitu masa remaja awal (12-15 tahun), masa remaja pertengahan (15-18 tahun), dan masa remaja akhir (18-21 tahun).

Menurut sumber dari guru Bimbingan Konseling (BK), kasus kekerasan simbolik dikelas dapat dilihat dari bentuk-bentuk kenakalan remaja yang mengarah pada pelanggaran tata tertib sekolah yang berdasarkan data menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran siswa diantara kelas VII hingga kelas IX, yang termasuk kategori sangat sering melakukan pelanggaran tata tertib sekolah adalah kelas VIII terutama rombongan belajar (rombel) kelas VIII SMP Negeri 2 Japara. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa selama satu semester berjalan pada tahun pelajaran 2013/2014, kejadian pelanggaran siswa terhadap tata tertib sekolah yang sangat menonjol adalah kelas VIII yang secara emosional para siswa dalam menyelesaikan masalah terkadang tidak menggunakan cara-cara damai dan dialog dan lebih mengedepankan perilaku kekerasan secara fisik menjadi kebiasaan dalam menyelesaikan masalah, ini belum lagi apabila terjadi keterlibatan siswa dalam situasi kekerasan massa yang pada akhirnya siswa akan menjadi korban secara fisik maupun psikis yang berkepanjangan akibat muncul trauma pada diri siswa terutama kelas VIII SMP Negeri 2 Japara.

Iwan Sukma Nur Ichtiar, 2014

*IMPLEMENTASI NILAI MORAL TATA TERTIB SEKOLAH SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SIMBOLIK
DALAM MENCEGAH KENAKALAN SISWA*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Peran pemerintah dalam menangani tindakan kekerasan dikalangan siswa diperlukan peraturan-peraturan perundang-undangan secara tegas untuk melindungi siswa dari tindakan kekerasan. Penanganan tindakan kekerasan oleh pemerintah tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada pasal 59 menyatakan bahwa :

Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

(Huraerah, 2012: 171)

Pada pasal 69 ayat (2) menyatakan bahwa Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1). Sedangkan siswa yang dilindungi dari tindakan kekerasan disekolah sesuai pada pasal 54 UU No. 23 tahun 2002 bahwa: Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya. (Huraerah, 2012: 171).

Meskipun pihak pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat melepaskan diri dari persoalan dekadensi moral, berupa merosotnya komitmen masyarakat dalam berbagai lapisan terhadap etika kehidupan masyarakat dan berbangsa serta bernegara. Fenomena lain yang sedang menggejala saat ini adalah perilaku yang tidak santun, penghinaan, perilaku kekerasan,

penyalahgunaan kekuasaan, merokok, membolos dan mencorat-coret dinding sekolah merupakan bentuk-bentuk pelanggaran tata tertib disekolah.

Sedangkan persoalan yang menarik dalam konteks nilai moral bagi siswa bahwa nilai moral pada siswa ternyata tidak hanya sebatas mengupayakan dan menciptakan bentuk-bentuk interaksi sosial yang sangat kondusif dan positif bagi tumbuh kembangnya nilai moral dalam kehidupan anak yang akhirnya bermuara pada perilaku moral dalam kehidupan keseharian mereka dan dianggap sangat penting, bahkan lebih penting dan memiliki arti yang amat strategis dari yang pertama, adalah menciptakan kemampuan bagi siswa secara cerdas mampu memahami dan menemukan nilai moral dalam dinamika interaksi sosialnya yang penuh dengan tantangan dan tamparan moral, terutama pada kondisi-kondisi sosial yang dinilai tidak kondusif dengan nilai moral.

Hingga saat ini sebenarnya banyak dikalangan siswa dengan mudahnya berinteraksi dengan kondisi-kondisi sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, sebagai akibat dari dampak negatif arus globalisasi yang sangat pesat akhir-akhir ini, kejadian tersebut sebagai akibat interaksi sosialnya yang sudah sedemikian terbuka tanpa mengenal batas dan tempat.

Segala bentuk kekerasan tersebut, kini semakin marak terjadi di Indonesia, baik di keluarga, sekolah, masyarakat dan juga di level negara. Kekerasan itu bisa terjadi kapan saja dan dilakukan oleh siapa saja. Terkadang, secara sengaja maupun tidak sengaja perilaku yang menyimpang bisa dikatakan sebagai tindak kekerasan terhadap seseorang.

Dampak negatif tersebut antara lain semakin maraknya berbagai penyimpangan norma kehidupan agama dan sosial kemasyarakatan yang terwujud dalam bentuk kenakalan siswa di sekolah seperti: sikap tidak menghormati kepada guru dan karyawan, perilaku ini tampak dalam hubungan siswa dengan guru atau karyawan di mana siswa sering acuh tak acuh terhadap keberadaan guru dan karyawan sekolah, kurang disiplin terhadap waktu dan tidak mengindahkan

Iwan Sukma Nur Ichtiar, 2014

**IMPLEMENTASI NILAI MORAL TATA TERTIB SEKOLAH SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SIMBOLIK
DALAM MENCEGAH KENAKALAN SISWA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

peraturan. Siswa masih sering terlambat masuk kelas, membolos, tidak memakai seragam dengan lengkap, dan menggunakan model baju yang tidak sesuai ketentuan sekolah dan membawa senjata tajam, perilaku kurang memelihara keindahan dan kebersihan lingkungan tampak dengan adanya perbuatan mencorat-coret dinding sekolah atau kelas, merusak tanaman, dan membuang sampah seenaknya, perkelahian antar siswa, sering terjadi perkelahian antar siswa satu sekolah bahkan perkelahian antar sekolah, merokok di sekolah pada jam istirahat, berbuat asusila, seperti adanya siswa putra yang mengganggu siswa putri dan melakukan perbuatan asusila di lingkungan sekolah.

Kenakalan siswa yang dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan disekolah, pencegahannya sering dilakukan dengan pendekatan kedisiplinan. Menurut Martono (2012: 1) mengemukakan bahwa

Kekerasan atau *bullying* di sekolah, sering dilegitimasi dengan alasan “menegakkan disiplin” di kalangan siswa atau mahasiswa misalnya kekerasan yang dilakukan guru karena siswa tidak mengerjakan PR, ribut dikelas dan bolos serta kekerasan yang dilakukan sesama siswa saat ospek. Selain alasan menegakkan disiplin juga dapat terjadi karena motif menunjukkan rasa solidaritas, proses pencarian jati diri, serta kemungkinan adanya gangguan psikologis dalam diri siswa. Misalnya, tawuran antarpelajar yang dapat dilatarbelakangi karena siswa merasa menjadi satu golongan yang membela “teman” atau “membela sekolahnya”.

Selain berbagai bentuk kenakalan siswa yang dikategorikan dalam kekerasan fisik serta kekerasan psikologi yang dampaknya dapat diidentifikasi, sebenarnya terdapat bentuk kekerasan lain yang berbeda namun dampaknya sangat dirasakan oleh siswa, dijelaskan dalam Martono (2012: 4) kekerasan dalam bentuk lain dan berbeda tersebut adalah kekerasan simbolik yang mengatakan bahwa banyak pihak yang tidak menyadari bahwa akan adanya bentuk kekerasan lain yang hampir terjadi disekolah setiap hari. Bentuk kekerasan tersebut adalah ‘kekerasan simbolik’.

Lebih lanjut konsep tentang ‘kekerasan simbolik’ dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, seorang sosiolog dari Perancis. Bourdieu menggunakan konsep ini

Iwan Sukma Nur Ichtiar, 2014
IMPLEMENTASI NILAI MORAL TATA TERTIB SEKOLAH SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SIMBOLIK
DALAM MENCEGAH KENAKALAN SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

untuk menjelaskan mekanisme yang digunakan kelompok kelas atas yang mendominasi struktur sosial masyarakat untuk “memaksakan” ideologi, budaya, kebiasaan, atau gaya hidupnya kepada kelompok kelas bawah yang didominasi. Rangkaian budaya ini oleh Bourdieu disebut juga sebagai habitus. Akibatnya masyarakat kelas bawah, dipaksa untuk menerima, menjalani, mempraktikkan, dan mengakui bahwa habitus kelas atas merupakan habitus yang pantas bagi mereka (kelas bawah), sedangkan habitus kelas bawah merupakan habitus yang sudah selayaknya “dibuang jauh-jauh”. (Martono, 2012: 5).

Tentang ‘kekerasan simbolik’ Pierre Bourdieu (1995) dalam Martono, M., (2012: 40) istilah ‘kekerasan simbolik’ (*symbolic violence*), ‘kuasa simbolik’ (*symbolic power*), dan ‘dominasi simbolik’ (*symbolic dominance*). Proses ini salah satunya dapat dapat berlangsung melalui proses pembelajaran disekolah.

Dalam pandangan Martono (2012: 41) pendidikan bagi Bourdieu hanyalah sebuah alat untuk mempertahankan eksistensi kelas dominan. Sekolah pada dasarnya hanya menjalankan proses reproduksi budaya (*cultural reproduction*), sebuah mekanisme sekolah, dalam hubungannya dengan institusi yang lain, untuk membantu mengabadikan ketidaksetaraan ekonomi antar generasi (Giddens, 2006). Kelas dominan mempertahankan posisinya melalui apa yang disebut *Illich-hidden curriculum*, sekolah mempengaruhi sikap dan kebiasaan siswa dengan menggunakan budaya kelas dominan. Kelas dominan memaksakan kelas terdominasi untuk bersikap dan mengikuti budaya kelas dominan melalui sekolah. Sekolah hampir selalu menerapkan budaya kelas dominan dalam aktivitasnya. Siswa dari latar belakang kelas bawah (kelompok minoritas di sekolah) mengembangkan cara berbicara dan bertindak yang biasa digunakan kelas dominan atau yang biasa diistilahkan Bourdieu dengan habitus.

Sebagai perwujudan implementasi dari kebijakan pendidikan nasional, SMP Negeri 2 Japara juga tidak luput dari kritikan dan masukan dari masyarakat demi kemajuan pendidikan siswa yang ada di SMP Negeri 2 Japara. Kemudian untuk

meminimalisir tindakan kekerasan yang berupa pelanggaran siswa, maka berbagai upaya telah dilaksanakan oleh SMP Negeri 2 Japara lewat pembinaan siswa yang lebih mengarah kepada kedisiplinan siswa terhadap tata tertib siswa.

Selaras dengan tugas pendidikan, sebenarnya bukan hanya dengan meminimalisir tindakan kekerasan, apalagi kekerasan yang dilandasi dengan rasa emosional yang tinggi. Hal tersebut tidaklah dapat memecahkan suatu persoalan. Keterbukaan dan kebijaksanaanlah yang akan mampu membangun kepribadian siswa yang memiliki karakter terbuka, manusiawi, dan memiliki kesadaran yang tinggi. Jika seseorang dihadapkan pada realitas yang diliputi bertumpuk persoalan-persoalan hidup yang sulit, maka ia akan mampu memecahkan dengan keterbukaan dan kebijaksanaan, sesulit apapun persoalan yang siswa hadapi akan dapat terselesaikan dengan baik melalui kedewasaan yang tinggi.

Melalui ideologi Pancasila yang diajarkan dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai suatu sistem filsafat pada hakekatnya merupakan suatu nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Karena dalam filsafat Pancasila terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan menyeluruh dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai.

Sebagai suatu nilai, ideologi Pancasila juga memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai tersebut akan dijabarkan dalam kehidupan yang praktis maupun dikehidupan yang nyata dalam masyarakat, berbangsa maupun negara maka nilai-nilai tersebut dijabarkan dalam norma-norma, norma-norma tersebut meliputi norma moral dan norma hukum.

Oleh karena itulah, maka pertahanan nilai moral yang menjadi pegangan masyarakat akan semakin merosot, nilai tradisi bangsa Indonesia yang semula ramah, lembut, dan santun akan terkikis oleh nilai-nilai baru yang bersandar dan

berlindung kepada kebebasan dengan mengatasnamakan hak asasi. Standar nilai yang dipegang oleh masyarakat yang semakin rapuh maka dengan sendirinya akan siap untuk digantikan dengan standar lainnya. Nilai-nilai yang bersumber kepada budaya atau tata nilai yang dipegang teguh masyarakat akan mengalami perubahan dan perkembangan. Dengan kata lain, rujukan nilai moral yang dikembangkan oleh pendidikan tidak cukup hanya berdasarkan kepada nilai moral masyarakat, melainkan nilai-nilai yang bersumber dari agama, dan tercermin dalam pendidikan melalui pembinaan kesiswaan sebagai upaya menerapkan kedisiplinan siswa terhadap tata tertib sekolah.

Implementasinya dari nilai moral seperti yang diinginkan di atas dalam pembelajaran, menjadikan nilai moral dalam pembelajaran merupakan pilihan dalam menjawab dinamika psikososial dalam diri siswa. Nilai-nilai moral yang dijadikan standar diatas dikarenakan model pengajarannya yang memang sangat menekankan akan terwujudnya kemampuan anak untuk memilah dan memilih, mengeksplorasi serta mengaplikasikannya secara cerdas terhadap nilai-nilai moral yang berkembang di sekitarnya. Dengan maksud siswa didorong untuk melakukan pilihan-pilihan nilai moral yang terbaik bagi dirinya dan masyarakatnya secara cerdas dan bertanggung jawab, sehingga melahirkan keputusan moral yang bertanggung jawab dan penuh kesadaran diri tanpa paksaan dari luar.

Pada hakikatnya nilai merupakan pencerminan budaya suatu kelompok masyarakat. Setiap masyarakat memiliki nilai dan sikap masing-masing. Nilai apabila ditinjau sebagai sistem nilai, merupakan pedoman kehidupan bermasyarakat yang lebih tinggi tingkatnya dari pada norma sosial, karena norma sosial itu juga bersumber dan berpedoman kepada sistem nilai. Sistem nilai tidak hanya mempengaruhi tingkah laku, sikap dan tindakan seseorang, melainkan lebih jauh dari itu yaitu menjadi dasar untuk mencapai tujuan hidupnya.

Nilai juga mempengaruhi pembentukan dan arah sikap seseorang. Nilai juga dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatan seseorang dengan mempengaruhi

sikap dan penilaian terhadap konsekuensi dari pada perilaku dan perbuatan seseorang tersebut. Melalui proses seperti ini, nilai dapat dilihat sebagai kunci bagi lahirnya perilaku dan perbuatan seseorang. Oleh karena itu, pengajaran dan penanaman nilai merupakan hal penting dalam rangka pembinaan sikap dan kepribadian siswa.

Nilai-nilai yang ditanamkan kepada siswa harus semakin diperdalam dengan cara memperkenalkan mengapa nilai-nilai itu ditanamkan. Tahap demi tahap mulai dikembangkan unsur pemahaman kepada diri siswa, nilai-nilai kejujuran, keadilan, kepahlawanan harus sudah mulai diperkenalkan dan harus mendapat tekanan serta perhatian.

Ditinjau dari usia remaja, usia tersebut merupakan usia sekolah bagi anak. Di lingkungan sekolah posisi remaja adalah sebagai siswa, jadi kenakalan remaja yang dilakukan oleh siswa dapat disebut sebagai kenakalan siswa. Dengan demikian kenakalan siswa merupakan penyimpangan perilaku siswa yang berakibat siswa melanggar aturan atau tata tertib sekolah.

Sebuah lembaga pendidikan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mengembangkan sebuah penciptaan lingkungan sekolah yang menghargai kultur yang hormat terhadap nilai-nilai moral. Sekolah bisa menjadi kesempatan yang baik untuk membuktikan kinerja dan integritas profesional mereka sehingga mereka mampu memposisikan diri sebagai model bagi keteladanan siswa.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wakil kepala sekolah SMP Negeri 2 Japara bidang kesiswaan, ditemukan beberapa kasus pelanggaran siswa terhadap tata tertib sekolah, seperti: membolos, berkelahi, merokok, cara berpakaian, tidak melaksanakan upacara hingga pada penghinaan terhadap guru dan sesama siswa. Untuk itulah penulis berusaha mengungkapkan dan menganalisa kenakalan siswa lewat pelanggaran-pelanggaran terhadap tata tertib sekolah dengan mengetahui implementasi nilai moral tata tertib sekolah sebagai

bentuk kekerasan simbolik dalam mencegah kenakalan siswa di SMP Negeri 2 Japara.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Jenis-jenis pelanggaran tata tertib sekolah yang termasuk dalam kategori kekerasan simbolik yang ditimbulkan akibat dari kenakalan siswa dilingkungan sekolah telah memberikan pengaruh pada siswa yang lainnya, untuk itulah perlu diketahui bentuk-bentuk kenakalan siswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan siswa usia remaja awal pada sekolah menengah pertama.
- 2) Di sekolah daerah terpencil yang perlu adanya penanaman nilai-nilai moral yang terdapat dalam tata tertib sekolah sebagai bentuk dari kekerasan simbolik sekolah dalam menegakkan kedisiplinan siswa, untuk itulah dalam kekerasan simbolik diimplementasikan ke dalam nilai-nilai moral tata tertib sekolah sangat diperlukan dalam upaya membentuk karakter disiplin siswa di sekolah
- 3) Banyaknya para siswa yang melanggar tata tertib sekolah sebagai salah satu bentuk kenakalan siswa, membuat pihak sekolah melakukan upaya-upaya untuk mencegah kenakalan siswa dengan kajian nilai-nilai moral kekerasan simbolik di sekolah berbagai program kegiatan pembinaan kesiswaan, dengan cara meningkatkan kedisiplinan siswa terhadap tata tertib disekolah.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti mengemukakan batasan dan rumusan masalah yakni pada bagian ini, peneliti membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

Iwan Sukma Nur Ichtiar, 2014
*IMPLEMENTASI NILAI MORAL TATA TERTIB SEKOLAH SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SIMBOLIK
DALAM MENCEGAH KENAKALAN SISWA*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pertama, secara substansial penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran terhadap tata tertib sekolah yang termasuk dalam kategori kekerasan simbolik.

Kedua, bentuk dan faktor yang mempengaruhi kenakalan siswa usia remaja awal pada sekolah menengah pertama.

Ketiga, nilai moral tata tertib yang termasuk dalam bentuk kekerasan simbolik.

Keempat, implementasi nilai-nilai moral kekerasan simbolik dalam membentuk karakter disiplin siswa melalui tata tertib sekolah.

Keempat, adanya upaya sekolah meningkatkan kedisiplinan siswa terhadap nilai moral tata tertib sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam mencegah kenakalan siswa.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka yang menjadi persoalan inti juga fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi nilai moral tata tertib siswa sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam mencegah kenakalan siswa. Agar lebih terperinci dan operasional, maka peneliti ingin mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa sajakah jenis-jenis pelanggaran tata tertib apa saja yang sering dilakukan oleh siswa sesuai dengan kategori kekerasan simbolik ?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan siswa ?
3. Apa sajakah nilai moral tata tertib yang termasuk dalam bentuk kekerasan simbolik ?
4. Bagaimana implementasi nilai moral tata tertib sekolah sebagai bentuk kekerasan simbolik mencegah kenakalan siswa ?

Iwan Sukma Nur Ichtiar, 2014

IMPLEMENTASI NILAI MORAL TATA TERTIB SEKOLAH SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SIMBOLIK
DALAM MENEGAH KENAKALAN SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

5. Bagaimana upaya sekolah meningkatkan kedisiplinan siswa terhadap nilai moral tata tertib sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam mencegah kenakalan siswa ?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang upaya pencegahan kenakalan siswa melalui pendekatan implementasi nilai moral tata tertib siswa sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam mencegah kenakalan siswa. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam informasi tentang:

1. Apa sajakah jenis-jenis pelanggaran tata tertib apa saja yang sering dilakukan oleh siswa sesuai dengan kategori kekerasan simbolik.
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kenakalan siswa.
3. Apa sajakah nilai moral tata tertib yang termasuk dalam bentuk kekerasan simbolik.
4. Bagaimana implementasi nilai moral tata tertib sekolah sebagai bentuk kekerasan simbolik mencegah kenakalan siswa.
5. Bagaimana upaya sekolah meningkatkan kedisiplinan siswa terhadap nilai moral tata tertib sebagai bentuk kekerasan simbolik dalam mencegah kenakalan siswa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara ilmu (teoritik) maupun empirik (praktik). Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi pemikiran atau sebagai literatur kajian dalam dunia pendidikan terutama Pendidikan nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), termasuk pada kajian-kajian keilmuan dan tradisi sosial studi yang menjadi bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari *Social studies*. Pandangan

Iwan Sukma Nur Ichtiar, 2014

IMPLEMENTASI NILAI MORAL TATA TERTIB SEKOLAH SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SIMBOLIK

DALAM MENCEGAH KENAKALAN SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tersebut sesuai dengan pendapat Wahab dan Sapriya (2011:102), mengemukakan bahwa:

PKn sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan salah satu Ilmu sosial (*Social Studies*) dan salah satu dari lima tradisi yakni transmisi kewarganegaraan (*citizenship transmission*). Saat ini tradisi itu sudah berkembang pesat menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal sebagai *citizenship education*, yang memiliki paradigma sistemik di dalamnya terdapat tiga domain yakni: domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural.

Sehingga dapat dijadikan landasan untuk memperkuat dimensi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang terdiri dari *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic dispositions*.

Sedangkan keterkaitan penelitian ini juga terletak pada referensi sosial budaya pendidikan, karena peneliti beranggapan bahwa para pelaku pendidikan merupakan bagian dari kerjasama sosial budaya dalam ranah pendidikan sebagai pelopor perubahan sikap dan karakter siswa menghadapi gejala fenomena sosial budaya. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muchtar (2004:22), bahwa:

Dalam pendidikan itulah sebetulnya kita harus berpikir dengan referensi sosial budaya. Kita perlu mencari pemikiran-pemikiran baru terutama tentang makna atau arti pendidikan dan pengembangan pendidikan dalam situasi bangsa yang mengidap kelemahan-kelemahandan citra keterbelakangan. Dari referensi sosial budaya, pendidikan itu adalah pengembangan budaya, juga terapi budaya dan transformasi budaya.

Temuan yang didapat dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktik bagi beberapa pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

- a. Mampu menelaah secara kritis dari implementasi nilai-nilai moral yang dalam kekerasan simbolik tata tertib siswa sebagai metode pencegahan terhadap kenakalan siswa yang tepat melalui penegakkan kedisiplinan terhadap tata tertib sekolah.

- b. Dapat menemukan fakta-fakta atau konsep-konsep yang berkaitan dengan pendidikan nilai dan psikologi sosial pendidikan untuk mengukuhkan PKn sebagai bagian dari kajian ilmu sosial (*Social Study*) sebagai *Civic Disposition* (watak-watak kewarganegaraan). Karena komponen ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran PKn. Dimensi watak Kewarganegaraan dapat dipandang sebagai "muara" dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya. Dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran PKn, karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap dan potensi lain yang bersifat afektif. Budimansyah dan Karim (2008: 59).

Van Gunsteren (1998) dalam Wahab dan Sapriya (2011: 205) melakukan konseptualisasi terhadap kelompok masyarakat yang beragam dan kategorisasi orang-orang yang ada di masyarakat berdasarkan "*races, classes, genders, nations, religions, professions, political parties*". Ia melihat pluralitas dari hubungan antara kelompok-kelompok dan perkumpulan-perkumpulan orang yang ada di masyarakat, bukan pada tingkat individual.

2. Bagi pihak yang terkait

- a. Institusi pemerintahan: Penelitian ini dapat dijadikan referensi sekaligus kontribusi bagi institusi pemerintahan terutama komunitas akademik, terhadap kajian yang terdapat dalam nilai moral yang ada pada bentuk kekerasan simbolik dari tata tertib sekolah untuk membentuk karakter siswa sebagai pengembangan warga negara yang menghargai budaya, humanis, bermoral, bertanggung jawab terhadap perkembangan siswa disekolah.
- b. Institusi pendidikan: Sebagai masukan bagi *civitas akademika* SMP Negeri 2 Japara, agar dapat memberikan pemahaman secara tepat

tentang nilai moral dalam tata tertib sekolah yang termasuk dalam kategori kekerasan simbolik sehingga dalam implementasinya diharapkan pihak sekolah dalam membuat doktrin peraturan tata tertib sekolah bisa dipatuhi oleh siswa.

- c. Bagi guru PKn: Memberikan kontribusi yang positif terhadap strategi dan upaya pencegahan kenakalan siswa dengan meningkatkan kedisiplinan siswa terhadap tata tertib sekolah melalui pendekatan yang tepat terhadap nilai moral yang terkandung dalam tata tertib sekolah serta kesesuaian dengan teori tentang kekerasan.

F. Struktur Organisasi Tesis

Untuk mempermudah penulisan tesis ini, penulis akan menyusun dalam bentuk sistematika tesis. Sistematika tesis adalah pokok persoalan yang akan disajikan dalam bab-bab yang terangkum dalam suatu penelitian tesis. Adapun sistematika yang akan dibahas dalam struktur organisasi tesis sebagai berikut:

1. Bagian Pendahuluan tesis, terdiri atas:

(a) Halaman Judul, (b) Pernyataan, (c) Halaman Pengesahan Tesis, (d) Abstrak, (e) Abstrac, (f) Kata Pengantar, (g) Daftar Isi, (h) Daftar Lampiran, (i) Daftar Tabel, (j) Daftar Bagan, (k) Daftar Gambar

2. Bagian Inti tesis terdiri atas:

Bab I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penelitian Tesis dan Paradigma Penelitian

Bab II Landasan Teori berisi bab yang menguraikan tentang Pengertian Nilai dan Moral, Hierarki Nilai, Pengertian Moral, Perkembangan Moral Siswa, Perkembangan Sikap Siswa, Ciri-ciri Sikap Moral Siswa, Komponen-Komponen Sikap Moral Siswa, Pengukuran Sikap Moral Siswa,

Iwan Sukma Nur Ichtiar, 2014

*IMPLEMENTASI NILAI MORAL TATA TERTIB SEKOLAH SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SIMBOLIK
DALAM MENCEGAH KENAKALAN SISWA*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pengertian Tata Tertib Sekolah, Gambaran Umum Tentang Peranan Guru di SMP, Gambaran Umum Tentang Tindakan Kekerasan, Faktor dan Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan, Konsep Dasar Kekerasan Simbolik, Kekerasan Simbolik di Lingkungan Sekolah, Gambaran Umum Tentang Siswa Dalam Usia Remaja, Perkembangan Perilaku dan Kepribadian Siswa dalam Usia Remaja, Kajian Tentang Kenakalan Siswa, Bentuk, Dampak dan Motif Kenakalan Siswa, Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Siswa.

Bab III Metode Penelitian merupakan bab yang berisi Dasar Penelitian, Fokus Penelitian, Sumber Data Penelitian, Alat dan Teknik Pengumpulan Data, Objektivitas dan Keabsahan Data, Metode Analisis Data dan

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan tentang analisis deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian..

Bab V Penutup berisi Kesimpulan dan Rekomendasi bagi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan kepentingan dengan penelitian ini.

3. Bagian Akhir Tesis berisi Daftar Pustaka, Lampiran – lampiran.

G. Paradigma Penelitian

Sebuah teori memegang peranan penting dalam menentukan masalah, metode, dan data dalam penelitian kualitatif sehingga terbentuklah sebuah paradigma penelitian.

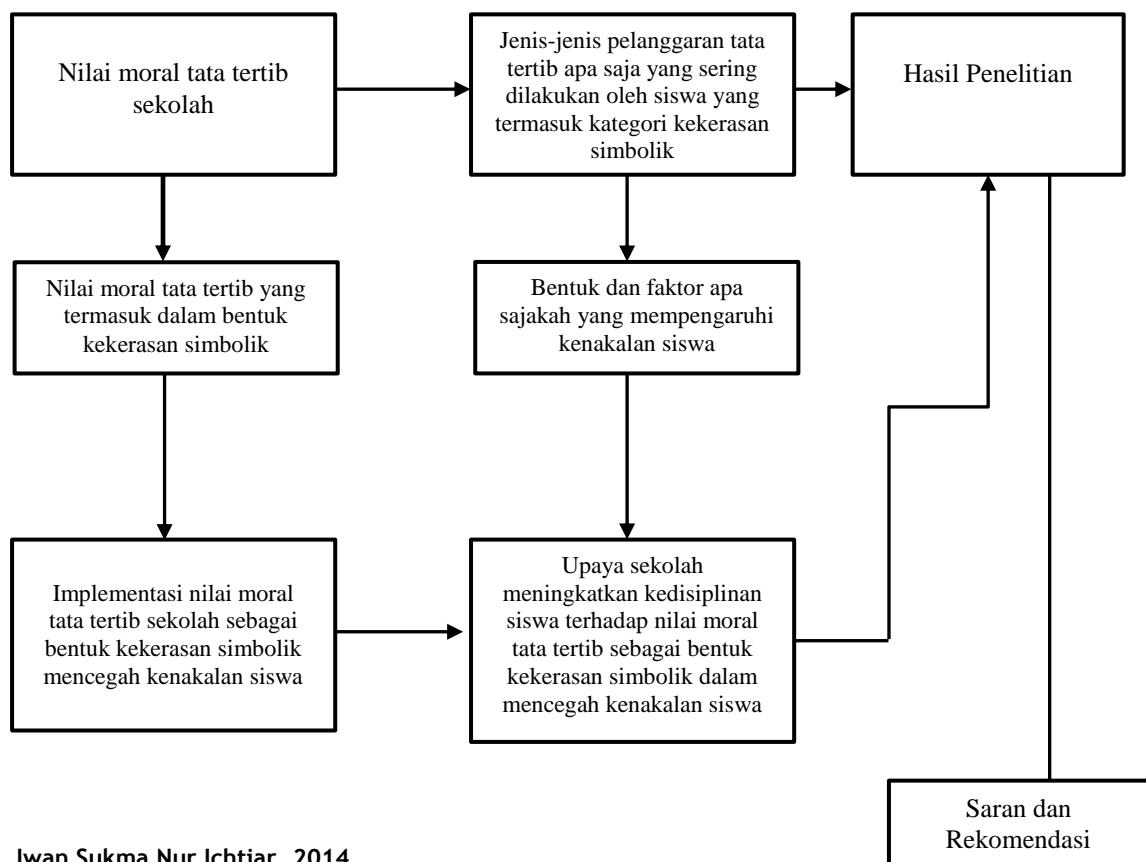
Harmon (1970) sebagaimana yang dikutip Moelong (2007:49) mendefinisikan ‘paradigma’ sebagai cara mendasar untuk mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus tentang visi realitas. Sementara itu Capra (1996) mendefinisikan paradigma sebagai konstelasi konsep, nilai-nilai persepsi dan praktek yang dialami bersama oleh masyarakat, yang membentuk visi khusus tentang realitas sebagai dasar tentang cara mengorganisasikan dirinya (Moelong, 2007:49).

Sedangkan menurut Muchtar (2004:35), menjelaskan tentang paradigma penelitian bahwa: Paradigma penelitian dijadikan dasar pandangan dan arah operasional mendekati proses pemecahan masalah dalam penelitian.

Dari definisi tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud paradigma adalah dasar pandangan untuk mempersepsikan, berpikir, menilai dan dijadikan arah operasional untuk melakukan proses pemecahan masalah yang berkaitan dengan kajian pemecahan masalah dalam penelitian sehingga mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif.

Berikut ini peneliti membuat bagan paradigma penelitian agar lebih mudah memahami penelitian, sebagai berikut:

Bagan 1.1
Paradigma Penelitian



Iwan Sukma Nur Ichtar, 2014

IMPLEMENTASI NILAI MORAL TATA TERTIB SEKOLAH SEBAGAI BENTUK KEKERASAN SIMBOLIK

DALAM MENEGAH KENAKALAN SISWA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Adapun penjelasan bagan diatas tentang paradigma penelitian menekankan mengenai:

1. Nilai moral yang terkandung dalam tata tertib sekolah harus diketahui oleh para warga sekolah termasuk bentuk-bentuk kekerasan simbolik dalam tata tertib itu sendiri.
2. Perlunya mengetahui jenis-jenis pelanggaran tata tertib apa saja yang sering dilakukan oleh siswa sesuai dengan kategori kekerasan simbolik
3. Setelah mengetahui jenis-jenis pelanggaran tata tertib sekolah akan diketahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi kenakalan siswa.
4. Perlunya implementasi nilai moral tata tertib sekolah sebagai bentuk kekerasan simbolik mencegah kenakalan siswa.
5. Dari berbagai upaya yang dilakukan dalam mencegah kekerasan tersebut lewat hasil penelitian dan kesimpulan serta memberikan saran dan rekomendasi masukan bagi pihak-pihak yang terkait.